



Prosiding 2006

Seminar Nasional PUSDIP-KLH UNIMED
PENATAAN KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan

Editor

Prof. Dr. AR Ritonga, M.Pd

Drs. Muffi Sudibyo, M.Si

Dra. Riwayatati, M.Si

ISBN 979-25-6490-X

Diterbitkan oleh

Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PUSDIP-KLH)
Universitas Negeri Medan

Prosiding 2006

Seminar Nasional PUSDIP-KLH UNIMED
PENATAAN KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN



Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan
Seminar Nasional Pusat Studi Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan

Editor

Prof. Dr. AR Ritonga, M.Pd

Drs. Mufti Sudibyoy, M.Si

Dra. Riwayatyi, M.Si.

ISBN 979-25-6490-X

Diterbitkan oleh

Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PUSDIP-KLH)

Universitas Negeri Medan

Pengantar Editor

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya kumpulan makalah hasil seminar Nasional bertema " Penataan Kota Berwawasan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PUSDIP-KLH) Universitas Negeri Medan tanggal 15 Juni 2005 di gedung Biro Rektor lantai III, telah selesai disusun dalam bentuk Prosiding.

Prosiding ini berisi 3 (tiga) makalah kunci yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ketua PUSDIP-KLH Unimed dan 59 (lima puluh sembilan) pembakalah yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, dari berbagai disiplin Ilmu Seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Universitas Negeri Medan Sendiri. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) serta kalangan akademisi di luar Perguruan Tinggi.

Intisari dari tulisan didalam Prosiding ini adalah merangkum segala gagasan (ide) dari nara sumber dan dari beberapa penulis dalam pengelolaan perkotaan dalam segala hal pada saat sekarang dan pada saat mendatang. Oleh karena itu tulisan ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan didalam pengelolaan kota/kabupaten baik dari segi keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kedamaian diantara penghuni kota, bagi para eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kalangan akademisi khususnya di tingkat Pemerintah kota/kabupaten.

Beragamnya disiplin ilmu dalam penulisan makalah prosiding ini memberikan tantangan bagi tim editor didalam mengedit makalah sehingga menjadi tulisan yang informatif dan mudah difahami oleh pembaca. Namun segala tantangan dan rintangan telah dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak khususnya panitia penyelenggara. Untuk itu tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada : Drs. Eka Daryanto MT, Ir. Rumilla Harahap, MT, Dra. Tiursani Lubis, M.Pd. Drs. Antonius Sinaga, M.Si. Dra. Martina Restuati, M.Si. Heiny Maharani SE dan Frisio Pasaribu.

Akhirnya meskipun tim editor telah bekerja semaksimal mungkin dalam mengedit tulisan dari berbagai sumber, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa tulisan didalam prosiding ini masih ada yang sulit untuk difahami oleh pembaca bila tidak sesuai dengan jurusannya. Oleh karena itu kritik membangun sesalu kami harapkan guna perbaikan dimasa mendatang didalam penyusunan prosiding yang berkaitan dengan tema yang sama.

Medan, juni 2005

Tim Editor.

Prof,DR. Abdul Rahman Ritonga, M.Pd.

Drs. Mufti Sudibyoy, M.Si

Dra. Riwayatyi, M.Si

Daftar Isi

<i>Pengantar dari Editor</i>	i
<i>Sambutan Ketua Panitia Pelaksana</i>	ii
<i>Sambutan Rektor Universitas Negeri Medan</i>	iv
<i>Daftar Isi</i>	vii
I. Makalah Kunci	
1. Program ADIPURA Mewujudkan Kota Yang bersih dan Teduh Muhammad Gempur Adnan, Ir (Kementerian Lingkungan Hidup)	1-4
2. Dari Eco-House menuju Ekopolis Johan Silas, Prof. (Guru Besar ITS)	5-6
3. Pembangunan Kota Madya Medan Berwawasan Lingkungan Dilihat Dari Perspektif Orang Awam Abdul Rahman Ritonga, Prof., Dr., M.Pd	7-13
II. Makalah Penunjang	
1. Pengelolaan Ekosistem Perairan di Perkotaan Sebagai Salah Satu Pengelolaan Lingkungan Herkules Abdullah, Ir., M.S	14-19
2. Dampak Pencemaran Air dan Usaha Penanganan Limbah Industri dan Teknologi M. Bayu Iskandar, Ir	20-24
3. Pemanfaatan Limbah Organik Dalam Rangka Menjaga Kebersihan Kota Syahmi Edi, Dr., M.Si	25-29
4. Penataan Ruang Ditinjau Dari Aspek Lingkungan Natap Tarigan, Drs.	30-33
5. Upaya Mengatasi Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Limbah Plastik Polistiren Dengan Menggunakan Bakteri P. Aeruginosa Ani Sutiani, Dra., M.Si	34-40
6. Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Sekolah untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa Dalam menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Perkotaan Efendi Manalu, Dr., M.Pd	41-46
7. Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Air Tanah di Kota Medan Ardin Siallagan, Drs.	47-51
8. Perencanaan Pembangunan Kota Berjangka 50 Tahun Mufti Sudiby, Drs., M.Si	52-55
9. Peranan Manusia Dalam Pelestarian Lingkungan Alam Doris Apriani Ritonga, S.Psi	56-60
10. Penataan Ruang Dalam Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Mberguh Sembiring, Drs., S.H., M. Hum	61-66
11. Masalah Urbanisasi Dalam Pengembangan Fisik Dan Tata Ruang Kota Mbina Pinem, Drs.	67-71
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penataan Kota Asnidar, Dra.	72-77
13. Fungsi Bentuk dan Struktur Hutan Kota Terhadap Kualitas Lingkungan Antonius Sinaga, Drs., M.Si	78-82
14. Penataan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Riwayati, Dra., M.Si	83-86
15. Konsep Pembangunan Yang Islami Dalam Penataan Kota Berwawasan Lingkungan Ramli Nur, Drs., M.A	87-94
16. Perencanaan Lingkungan Berakibatkan Mengganggu Kesehatan Manusia Yusna Melianti, Dra., M.H	95-100

17. Lingkungan Pemukiman di Wilayah Perkotaan Ditinjau Dari Aspek Kesehatan Masyarakat Uswatun Hasanah, Dra., M.Si	101-107
18. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Untuk Kelestarian Hidup Djongken Simamora, Drs	108-110
19. Penghijauan Perkotaan Sebagai Salah Satu Pengelolaan Lingkungan Martina Restuati, Dra., M.Si	111-115
20. Pembangunan Industri Dalam Rangka Penataan Kota Berwawasan Lingkungan Teridah Sembiring, Drs.	116-121
21. Lingkungan Sehat, Indah, Bersih, dan Aman Sebagai Salah Satu Usaha Penanggulangan Masalah Lingkungan Syamsuarni, Dra	122-126
22. Teknologi Air Bersih dan Penanganan Limbah Dalam Mewujudkan Kota Yang Sehat Edim Sinuraya, Drs., S.T	127-133
23. Hutan Kota Untuk Penanggulangan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Indah Verawati, S.Psi	134-140
24. Perkotaan Yang Semakin Panas dan Upaya Penanggulangannya Masdiana Sinambela, Dra., M.Si	141-148
25. Apakah Adipura Mencerminkan Derajat Kesehatan Masyarakat Destanul Aulia, SKM., MBA	149-153
26. Manusia Lingkungan dan Kebudayaannya Ratih Baiduri, M.Si	154-158
27. Banjir dalam Perspektif Lingkungan Puji Prastowo, Drs., M.Si	159-162
28. Analisis Biaya Manfaat Dalam Upaya Perbaikan Program Lingkungan Di Perkotaan Lolita Dewi Armananty, SE	163-166
29. Pengendalian Limbah Domestik dan Industri di Perairan Perkotaan Sebagai Sarana Pengendalian Pencemaran Air Haikal Rahman, Ir., M.Si	167-171
30. Peranan Tanaman dalam Pembangunan Kawasan Hijau Kota Idramsa, Drs., M.Si	172-177
31. Aplikasi Persamaan Deferensial Untuk Menghitung Pencemaran Air Danau Izwita Dewi, Dra., M.Si	178-180
32. Penanggulangan Pencemaran Perairan di Perkotaan Dengan Mempergunakan Model Matematika sebagai Salah satu Biomonitoring Katrina Samosir, Dra.	181-184
33. Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kota dan Keterkaitannya dengan Lingkungan Hidup Kamarlin Pinem, Drs.	185-192
34. Pemukiman Berwawasan Lingkungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Julismin, Drs.	193-197
35. Pemanfaatan Biomassa <i>Saccaromyces cerevisiae</i> Termobilisasi Sebagai Penyerap Logam Berat Dalam Upaya Pengolahan Limbah Industri Perkotaan Jasmidi, Drs., M.Si	198-202
36. Perencanaan Penataan Ruang Kota dan Kaitannya dengan Pertumbuhan Perdagangan Butet Amfnah Lubis, Dra., M.Si	203-210
37. Optimasi Perencanaan dan Pengkondisian Fisik Sungai Sebagai Upaya Pengendalian Banjir Dan Pencemaran Lingkungan Perkotaan Efendi Napitupulu, DR., M.Pd	211-215
39. Alternatif Penanggulangan Sampah Organik Rumah Tangga dengan Penerapan Teknologi Fermentasi Murniaty Simorangkir, Dra., M.S	216-222

40. Pengembangan Kota Yang Nyaman dan Sejuk Linus Sihalo, Drs.	223-228
41. Prospek Tinjauan Sistem Pemukiman Perkotaan di Indonesia Lokot Muda Harahap, M.Si	229-236
42. Perencanaan Drainase Sebagai Penataan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Rumilla Harahap, Ir., M.T	237-239
✓ 43. Penataan Kota Medan Yang Berwawasan Lingkungan Nathanael Sitanggang, Drs., S.T., M.Pd	240-244
44. Teknik Sederhana Untuk Mendeteksi Akresi dan Erosi Pantai Sebagai Penunjang Tata Lingkungan Kota Di Wilayah Kepesisiran Nahor. M Simanungkalit, Drs., M.Si	245-251
45. Penataan Ruang Kota Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Sabar Ginting, Drs.	252-256
46. Penilaian Moral Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Rosnah Siregar, Dra., S.H	257-261
47. Membangun Sistem Pengelolaan Tata Ruang Liber Siagian, Drs., M.Si	262-270
48. Penanggulangan Sampah Dalam Peningkatan Lingkungan Sehat Di Sekitar Pinggiran Sungai Yetty Pangaribuan, Dra., M.Pd	271-275
49. Perencanaan Tata Ruang Kota dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Sri Mutmainah, Dra., M.Si	274-280
50. Pembangunan Kota Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Ramsul Nababan, S.H	281-286
51. Konsep Kebijakan Umum Pembangunan dan Pelayanan Air Bersih Abad 21 Di Indonesia Syahrizal Siregar, Ir., M.Si	287-295
52. Perencanaan Lingkungan Siti Mawar, Dra., M.S	296-301
53. Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum Dalam Penataan Kota Berwawasan Lingkungan Bonaraja Purba, Drs.	302-306
54. Perumahan dan Permukiman Menuju Kota Yang Berwawasan Lingkungan Tiursani Lubis, Dra., M.Pd	307-310
55. Sejarah Kota Medan Dan Perkembangannya Kuning Tarigan, Dra., M.S	311-315
56. Pemukiman dan Perencanaan Tata Ruang Marlinang Sitompul, Dra., M.Pd	316-319
57. Pencemaran Lingkungan dan Usaha Penanggulangannya Erlintan Sinaga, Dra., M.Kes	320-324
58. Kebijakan Kepala Daerah Terhadap Penataan Kota Berwawasan Lingkungan Busri Syahril, Drs. M.Si	325- 327

THE
Character Building
 UNIVERSITY

PENATAAN KOTA MEDAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Nathanael Sitanggang,
 Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan

Abstrak : Kota Medan adalah salah satu Kota Metropolitan di Indonesia yang sekaligus Ibukota Propinsi Sumatera Utara. Luas Kota Medan kurang lebih 265 km² dengan jumlah penduduk 2.255.827 orang dengan perincian 1.082.797 laki-laki dan 1.173.030 perempuan yang tersebar di 21 Kecamatan atau 151 Kelurahan (Bappeda Kota Medan, 2005). Kalau dibandingkan jumlah penduduknya dengan luas daerah, maka rata-rata kepadatan penduduk Kota Medan kurang lebih 8513 jiwa / km². Dari hasil perbandingan jelas terlihat bahwa Kota Medan sudah tergolong kota yang padat penduduk. Kota yang padat penduduk dapat memberikan arti kebutuhan tempat tinggal yang sangat besar, arah pergerakan penduduk yang sangat banyak, sehingga ada kecenderungan mendirikan tempat tinggal secara sembarangan dan mencari nafkah di tempat-tempat yang sembarangan pula. Karena itu, di dalam penataan Kota Medan haruslah konsisten menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan Tata Ruang Kota yang telah ditetapkan tanpa ada pengecualian atau dispensasi.

Pendahuluan

Penataan Kota Medan tidak terlepas dari Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang mencakup Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) dan Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara. Di dalam Undang- Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang telah digariskan bahwa tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Dari Undang- Undang tersebut dapat diketahui bahwa penataan suatu kota merupakan suatu proses perencanaan kota dan pemanfaatan daerahnya (ruang). Di dalam perencanaan kota dan pemanfaatan ruang dalam suatu kota harus tetap berpedoman kepada konsep Pembangunan Berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memenuhi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Pembangunan yang berkelanjutan telah diatur di dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Undang - Undang ini telah dirumuskan 6 sasaran pengelolaan hidup di Indonesia, yaitu :

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang.
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan / atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

Secara khusus, Perencanaan Tata Ruang Perkotaan telah diatur di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota, yang masih berlaku sampai saat ini. Untuk pembangunan kota Medan, secara konseptual pembangunan kota dikelompokkan dalam 3 bidang pembangunan, yaitu bidang fisik dan prasarana, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Karena luasnya cakupan dari bidang

pembangunan kota Medan tersebut, maka di dalam makalah ini hanya membahas bidang pembangunan fisik dan prasarana yang berwawasan lingkungan.

A. Kota Medan dalam Kebijakan Pengembangan Tata Ruang

Di dalam "Pembangunan Wilayah Kabupaten/ Kota menurut Tata Ruang" yang dibuat Bappedasu telah diuraikan beberapa kebijakan Pengembangan Tata Ruang yang ditetapkan pada tingkat nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara atau RTRWP Sumatera Utara (Bappedasu, 2002). Kota Medan dalam Kebijakan Pengembangan Tata ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) mencakup :

- 1) Menetapkan Medan sebagai Pusat Kegiatan nasional (PKN), yaitu sebagai pusat yang mendorong kawasan sekitarnya untuk mengembangkan sektor unggulan.
- 2) Menetapkan kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) sebagai kawasan tertentu yang mempunyai nilai strategis untuk diprioritaskan pengembangannya dalam konstelasi IMT-GT.
- 3) Menetapkan pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama, pelabuhan Sibolga dan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan pengumpan regional, dan pelabuhan Gunung Sitoli dan Teluk Nibung sebagai pelabuhan pengumpan lokal.
- 4) Bandar Udara Polonia ditetapkan sebagai pusat penyebaran primer.
- 5) Mengembangkan Medan dan Sibolga sebagai pusat pelayanan primer untuk mengakomodasikan fungsi perkembangan Sumatera Utara dalam skala kepentingan internasional, nasional, dan regional.
- 6) Kawasan perkotaan Mebidang ditetapkan sebagai kawasan tertentu pada lingkup nasional.
- 7) RTRWP Sumatera Utara 2002-2016 merencanakan Kawasan Medan, Kawasan

Rantau Prapat-Kisaran, Kawasan Tapanuli, Kawasan Danau Toba, dan Kawasan Nias sebagai kawasan andalan pada lingkup propinsi.

Pematang Siantar ditetapkan sebagai pusat pelayanan sekunder A tanpa mengembangkan wilayah sekitarnya sebagai kawasan andalan.

- 8) Bandar Udara Polonia pada akhir tahun rencana dipersiapkan untuk dipindahkan ke Kuala Namu dengan fungsi sebagai pusat penyebaran primer.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa posisi Kota Medan sangatlah strategis karena merupakan pintu gerbang nasional dan internasional.

B. Menata Kota Medan Berwawasan Lingkungan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, secara khusus Perencanaan Tata Ruang Perkotaan telah diatur di dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota. Di dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa di dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setidaknya tidaknya harus berisikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Pengembangan Penduduk Kota
- 2) Rencana Struktur/ Pemanfaatan Ruang Kota
- 3) Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kota
- 4) Rencana Sistem Transportasi
- 5) Rencana Sistem Jaringan Utilitas
- 6) Rencana Kepadatan Bangunan
- 7) Rencana Ketinggian Bangunan
- 8) Rencana Pengembangan/ Pemanfaatan Air Baku
- 9) Rencana Penanganan Lingkungan Kota
- 10) Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
- 11) Indikasi Unit Pelayanan Kota

Dengan demikian, untuk menata kota Medan Berwawasan Lingkungan dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada

butir-butir yang disebutkan di atas, ditambah dengan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan Pemerintah yang lainnya, seperti : Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang berwawasan lingkungan dan Undang-Undang NO. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dengan mempedomani Keputusan Menteri Pekerjaan Umum yang disebutkan di atas, maka menata kota Medan Berwawasan Lingkungan dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

1. Pengembangan Penduduk Kota

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam Pendahuluan bahwa kepadatan penduduk kota Medan tergolong padat yaitu 8513 jiwa / km². Dalam hal ini perlu diadakan pengaturan kepadatan penduduk untuk masing-masing bagian wilayah kota, misalnya dengan cara membangun perkantoran atau pusat perbelanjaan di daerah pinggiran kota (sub urban) dengan sendirinya penduduk kota akan menyebar ke arah pinggiran kota tersebut. Kalau diperhatikan di Kota Medan, Pengembangan Penduduk Kota telah dilaksanakan dalam beberapa hal seperti pembangunan beberapa perkantoran di daerah pinggiran kota, pemindahan tempat rekreasi Kebun Binatang dari Kampung Baru ke Bagian Wilayah Simalingkar. Tetapi kalau diperhatikan dan ditinjau dari aspek pengembangan penduduk kota ada beberapa hal kebijaksanaan yang dapat dikatakan kurang cocok seperti pembangunan Pusat Perbelanjaan Palladium yang sedang dibangun di Jalan Kapten Maulana Lubis, karena dapat diperkirakan akan menambah kepadatan penduduk pengguna lalu lintas di bagian wilayah ini.

2. Struktur Pelayanan Kegiatan Kota

Struktur pelayanan kegiatan kota dimaksudkan menggambarkan fungsi kegiatan yang sejenis di perkotaan,

misalnya kegiatan pendidikan yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMU/SMK, dan Perguruan Tinggi. Di kota Medan, kalau ditinjau dari fungsi kegiatan pendidikan formal dapat dikatakan belum terdapat masalah yang cukup berarti, namun dari fungsi kegiatan pendidikan non formal perlu mendapat pengaturan yang lebih baik. Karena kursus-kursus yang sudah menjamur tidak tertata dengan baik. Demikian juga halnya mengenai terminal, di Kota Medan terminal angkutan luar kota sudah ditentukan lokasinya dengan baik yaitu di terminal Amplas dan Pinang Baris, namun untuk angkutan dalam kota terminalnya belum terencana dengan baik.

3. Sistem Transportasi

Perencanaan sistem transportasi adalah menyangkut perencanaan sistem pergerakan dan prasarana penunjang untuk berbagai jenis angkutan. Di Kota Medan perencanaan sistem transportasi untuk angkutan laut dan angkutan kereta api dapat dikatakan tidak ada masalah. Angkutan udara sudah direncanakan perpindahannya dari bandara Polonia ke bandara Kuala Namu. Tetapi untuk angkutan darat sangat berpotensi menimbulkan permasalahan. Hal ini terjadi karena belum ditetapkannya jaringan jalan yang dapat dilintasi angkutan darat tertentu, jaringan jalan yang mana untuk angkutan kota, untuk becak, dan lain-lain, sehingga angkutan becak tidak dapat melintasi jalan protokol secara bebas yang sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Di samping itu perencanaan tentang jumlah armada angkutan kota perlu dibatasi. Saat ini terkesan bahwa jumlah angkutan kota di Medan sudah terlalu banyak dibandingkan dengan jaringan jalan yang tersedia, sehingga sering terdengar keluhan para supir angkutan kota adanya trayek yang tumpang tindih.

4. Sistem Jaringan Utilitas

Yang termasuk di dalam perencanaan jaringan utilitas adalah jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, sistem pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah cair rumah tangga, dan saluran pembuangan air hujan. Kalau diperhatikan di kota Medan saat ini yang mendapat prioritas untuk ditangani adalah saluran pembuangan air hujan. Hal ini terlihat dari seringnya kota Medan tergenang banjir akibat turunnya hujan, pada hal hujannya turun tidak begitu lama. Untuk itu diperlukan upaya secara terus menerus pemeliharaan/perawatan saluran yang ada supaya tidak tersumbat, dan menambah saluran pembuangan yang baru di daerah yang rawan banjir.

5. Kepadatan Bangunan

Rencana kepadatan bangunan dimaksudkan untuk menata pemanfaatan lahan yang tertutup bangunan pada bagian kota. Pada umumnya di setiap kota (termasuk kota Medan), ada kecenderungan masyarakat memanfaatkan seluruh lahan/pertapakannya dijadikan bangunan. Hal ini terjadi karena ada keinginan masyarakat memperoleh ruang kamar yang lebih banyak. Pada hal kondisi seperti ini mengakibatkan kondisi lingkungan yang tidak nyaman terhadap kesehatan karena tidak ada lagi tanan atau halamannya. Kalau bangunan tidak mempunyai halaman/pekarangan, maka air tanah tidak terisi kembali sehingga dapat mengakibatkan mudah terjadinya banjir. Untuk itu di kota Medan supaya pihak pemerintah kota secara konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 3 telah digariskan

bahwa pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- 2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- 3) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

6. Penanganan Lingkungan Kota

Untuk memelihara kenyamanan lingkungan hidup kota Medan, perlu dilakukan penanganan lingkungan secara berkesinambungan. Upaya yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Menambah taman kota
- 2) Menambah tanaman pohon di pinggir jalan raya maupun di bagian median jalan
- 3) Melakukan uji emisi bagi kendaraan bermotor;
- 4) Melakukan perencanaan dan pemeliharaan saluran pembuangan air secara teratur sesuai dengan *Sistem Drainase Perkotaan*.

C. Penutup

Penataan kota Medan berwawasan lingkungan untuk masa yang akan datang dapat diwujudkan dengan cara konsisten menerapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota dan melibatkan utusan dari masyarakat dan Perguruan Tinggi. Apalagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan bahwa seluruh lapisan masyarakat secara utusan harus

berpartisipasi dalam perencanaan suatu kota.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota Medan sudah dilakukan pada masa yang lalu, namun belum disosialisasikan kepada masyarakat mengenai isi tata ruang tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Karena itu diharapkan untuk masa yang akan datang supaya pihak pemerintah kota Medan menyebarluaskan isi tata ruang kota Medan tersebut sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan mematuhi. Pihak masyarakat dan Perguruan Tinggi sangat antusias berpartisipasi dalam hal perencanaan kota Medan. Hal ini terlihat dari sikap positif masyarakat dan Perguruan Tinggi pada Forum Musrenbang Kota Medan Metropolitan tanggal 3-4 Mei 2005 yang lalu, seluruh peserta Musrenbang aktif berpartisipasi mulai dari awal hingga akhir acara musyawarah dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Bappedasu (2002). *Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Menurut Tata Ruang*. Medan : Bappeda Propinsi Sumatera Utara.
- Bappeda Medan (2005). *Rancangan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Sosial Budaya Tahun 2006*. Medan : Pemerintah Kota Medan.
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.640/KPTS/1986 tentang *Perencanaan Tata Ruang Kota*.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang *Perumahan dan Pemukiman Yang Berwawasan Lingkungan*.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang *Bangunan Gedung*.

THE
Character Building
 UNIVERSITY